

BAB II

SEJARAH PEMERINTAHAN SAUDI DAN DINAMIKA KONFLIK SAUDI DENGAN YAMAN

A. Sejarah Arab Saudi

Arab Saudi atau Kerajaan Arab Saudi adalah negara Arab yang terletak di Jazirah Arab. Negara ini berbatasan langsung (searah jarum jam dari arah utara) dengan Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Persia, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, dan Laut Merah. Pada masa dahulu daerah Arab Saudi dikenal menjadi dua bagian yaitu daerah Hijaz yakni daerah pesisir barat Semenanjung Arab yang didalamnya terdapat kota-kota diantaranya adalah Mekkah, Madinah dan Jeddah serta daerah gurun Najd yakni daerah daerah gurun sampai pesisir timur semenanjung arabia yang umumnya dihuni oleh suku suku lokal Arab (Badui) dan Kabilah kabilah Arab lainnya. Arab Saudi mempunyai peran penting dalam percaturan dunia sesudah nabi Muhammad SAW mengembangkan agama islam, yang kemudian di sambut baik oleh umat seluruh dunia.¹⁴

Pada awal abad 18, pembaharu Muslim bernama Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mulai membentuk kembali ajaran islam. Abdul Wahhab mendapat kecaman dari penduduk ulama setempat atas ajaran yang disebarkannya. Dia mencari perlindungan di kota Diriyah, yang diperintah oleh Muhammad bin Saud, Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad bin Saud membentuk

¹⁴ Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Dirasat
Jakarta.2002, hal 25

kesepakatan untuk mengabdikan diri untuk memulihkan ajaran-ajaran murni Islam kepada masyarakat Muslim. Dalam proses perjalanannya, Muhammad bin Saud mendirikan Negara Saudi Pertama, yang makmur di bawah bimbingan spiritual dari bin Syaikh Abdul Wahhab.

Pada tahun 1788, Negara Saudi memerintah atas seluruh dataran tinggi pusat dikenal sebagai Najd. Pada awal abad ke 19, aturan diperluas ke sebagian besar Semenanjung Arab, termasuk Mekah dan Madinah. Popularitas dan keberhasilan para penguasa Al-Saud membangkitkan kecurigaan Kekaisaran Ottoman, yang mana merupakan kekuatan dominan di Timur Tengah dan Afrika Utara pada saat itu. Pada tahun 1818, Ottoman mengirimkan sebuah pasukan ekspedisi besar bersenjata dengan artileri modern ke wilayah barat Saudi. Tentara Ottoman mengepung Diriyah, yang kini telah tumbuh menjadi salah satu kota terbesar di semenanjung. Pasukan Ottoman meratakan kota dengan senapan lapangan dan dibuat secara permanen.

Pada tahun 1824, keluarga Al-Saud telah mendapatkan kembali kontrol politik dari Saudi pusat. Penguasa Saudi Turki bin Abdullah Al-Saud menjadikan Riyadh sebagai ibukota Saudi, sekitar 20 kilometer selatan Diriyah, dan mendirikan Negara Saudi Kedua. Selama sebelas tahun masa pemerintahannya, Turki berhasil melumpuhkan sebagian besar tanah ke Ottoman. Saat ia memperluas kekuasaannya, ia mengambil langkah untuk memastikan bahwa umat menikmati hak dan ia melihat kesejahteraan mereka

Pada tahun 1865 Ottoman mengadakan kampanye baru untuk memperpanjang kekaisaran Timur Tengah ke Semenanjung Arab. Tentara Ottoman merupakan bagian dari Negara Saudi, yang memerintah pada saat putra Faisal's Abdulrahman. Dengan dukungan dari Utsmani, keluarga Al-Rasyid dari Hail melakukan upaya bersama untuk menggulingkan Negara Saudi.

Pada tahun 1891 Abdulrahman bin Faisal Al-Saud dipaksa untuk meninggalkan perjuangan. Dia mencari perlindungan dengan suku Badui di gurun pasir luas Arabia timur. Abdulrahman dan keluarganya pergi ke Kuwait, di mana mereka tinggal sampai tahun 1902. Dan memiliki putera Abdulaziz, yang sudah memiliki tanda sebagai pemimpin dan seorang prajurit untuk kepentingan Islam. Abdulaziz bertekad untuk mendapatkan kembali warisan dari keluarga Al-Rasyid, yang telah mengambil alih Riyadh dan mendirikan gubernur di sana. Pada tahun 1902, Abdulaziz disertai dengan para pengikutnya mengadakan perjalanan malam ke Riyadh untuk merebut kembali kota tersebut, yang mana dikenal sebagai Benteng Masmak. Setelah mendirikan Riyadh sebagai markasnya, Abdulaziz menguasai semua Hijaz, termasuk Mekah dan Madinah. Pada tanggal 23 September 1932, negara ini bernama Kerajaan Arab Saudi, negara Islam dengan Arab sebagai bahasa nasional dan Al Qur'an sebagai konstitusi.¹⁵

¹⁵ "The History of Saudi Arabia" dalam

<http://www.saudiembassy.net/about/country-information/history.aspx> di akses 28 Juni 2010

A.1. Sistem Pemerintahan Monarkhi Arab Saudi

Arab Saudi merupakan salah satu Negara yang menganut sistem Monarkhi di Kawasan Timur Tengah. Sistem Monarkhi (kerajaan) berasal dari kota Mono yang berarti satu dan Archein yang berarti kekuasaan. Monarkhi adalah sebuah sistem pemerintahan yang di pimpin oleh raja atau kaisar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dimana dalam membuat kebijakan berada ditangan Raja. Sistem Monarkhi Arab Saudi merupakan Monarkhi absolute karena kekuasaan Raja yang berkuasa secara mutlak tanpa dibatasi oleh Undang-Undang, dan Raja sebagai pemegang kekuasaan, pemimpin kepala Negara dan kepala Pemerintahan. Sistem monarkhi dianggap paling efisien dan paling baik untuk mengatur Negara dan dalam banyak hal bisa menjamin perangkat pengaturan masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Setelah berdiri, struktur politik kerajaan Saudi mengalami perubahan dari bentuk patriarkhal keagamaan menjadi bentuk monarkhi dimana kekuasaan raja hanya dibatasi oleh hukum islam atau syariah dan dimana raja sering membuat metafora bahwa rakyatnya adalah suatu keluarga besar. Guna mencapai stabilitas dan legitimasi politik, penguasa Arab Saudi menggunakan islam sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan perkataan lain, legitimasi politik lebih bersumber pada kepemimpinan raja atau ideologi islam dari pada bersumber pada struktur politik yang sudah mapan.¹⁶

¹⁶ Sidik Jatmika, *AS Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 2000, hal.76

Dengan melihat kekuasaan yang ada pada raja di Saudi Arabai, maka dapatlah dikatakan bahwa kerajaan Saudi Arabia menekankan kembali pandangan islam, dimana antara agama dan Negara secara teoritis, tidak dapat dipisahkan. Rakyat Saudi memperlihatkan solidaritas yang amat besar dan dukungan bagi pemimpin politik, yaitu raja, yang membuat tuntutan serta melaksanakan kontrol atas rakyat. Menurut Frank Tachau keadaan ini dipengaruhi oleh lima karakteristik yang memberi kesan bahwa (1) di Saudi hanya terdapat pola kekuasaan hirarkis, (2) terdapat eksklusifisme yang di dasarkan pada kelompok wahhabi, (3) fleksibilitas strategis, khususnya yang berkaitan dengan ketidakstabilan dan pemanfaatan sumberdaya minyak, (4) terdapatnya konsentrasi kekuatan di pusat sehingga hamper tidak ada pendelegasian kekuasaan di daerah, dan (5) adanya neo tradisionalisme.

Hukum islam yang dipergunakan, membekali Saudi Arabia dengan hukum pidana dan perdata, juga mengatur segala persoalan yang berhubungan dengan agama. Hukum agama merupakan sumber legislatif, tetapi bila hukum agama tersebut tidak dapat dipergunakan, maka raja berhak untuk mengeluarkan keputusannya. Keputusan menjadikan al-Quraan sebagai satu-satunya konstitusi itu membuktikan adanya bobot religius, di samping juga memungkinkan Negara tersebut membuat aturan-aturan secara fleksibel, asal tidak bertentangan dengan ayat-ayat dalam kitab suci. Dari segi politik hal ini juga memungkinkan keluarga raja untuk luput dari batasan peraturan formal yang mengikat dan tidak di bebani oleh kewajiban-kewajiban yang nyata bagi rakyatnya. Syariah merupakan dasar bagi sistem yuridis berdasarkan pada al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad

SAW. Syariah memerintah siapa saja termasuk, termasuk raja. Hukum islam yang ditetapkan menyeluruh inilah yang menyelamatkan monarkhi dari tuduhan dan kemungkinan melaksanakan absolutisme dan teokrasi.¹⁷

Penguasa Arab Saudi memiliki kecenderungan yang kuat untuk membatasi sesempit mungkin berlakunya nilai-nilai liberal dan demokratis dan membatasi partisipasi rakyatnya. Kekuasaan politik amat terpusat pada raja yang memegang berbagai jabatan sebagai berikut:¹⁸

1. Kepala Dinasti Saudi;
2. Perdana Menteri;
3. Kepala Eksekutif;
4. Imam Keagamaan Tertinggi;
5. Komandan Angkatan Bersenjata;
6. Kepala Pengadilan;

Pemerintahan monarkhi Arab Saudi merupakan perpaduan antara kekuasaan politik dan semangat keagamaan yang tiada bandingnya sehingga mampu untuk melaksanakan modrenisasi dan perubahan sosial dengan cepat. Keadaan ini juga ditunjang oleh adanya minyak, dimana Arab Saudi memiliki seperempat cadangan minyak dunia non komunis serta merupakan Negara pengekspor minyak yang paling besar di kawasan Timur Tengah. Keberhasilan rezim Monarkhi di Arab Saudi tercermin dari tingkat dan kualitas kehidupan

¹⁷ Harwanto Dahlan, Diktat Kuliah Politik dan Pemerintahan Timur Tengah, UIMY, hal 5

umum yang semakin meningkat dan mampu mengangkat Negara tersebut ke posisi penting dalam pencaturan politik internasional.¹⁹

A.2. Politik Luar Negeri Arab Saudi

Arab Saudi adalah sebuah Negara Islam. Dengan demikian tentu terdapat keterkaitan yang erat dengan islam, baik dalam ideologi, agama dan kebudayaan dengan hal-hal tertentu dari politik luar negerinya. Politik luar negeri Arab Saudi bila diamati bisa dibagi dalam tiga fase sesuai konstelasi politik dan kekuasaan yang berbeda-beda di Timur Tengah, yaitu :

1. Aliansi Dinasti (1932- 1956)
2. Perang dingin Arab (1956- 1967)
3. Politik dan bantuan luar negeri (1967-1980)

Ketiga fase tersebut mempunyai hubungan dan merupakan elemen-elemen dari kebijaksanaan cita-cita islam Arab Saudi yang terutama merupakan ideologi yang anti radikalisme.

Apabila diamati politik luar negeri Saudi dibagi ke dalam tiga periode yakni :

Pada periode *pertama* yaitu, di masa Saudi Arabi sebagai Negara yang baru bangkit dari gelombang Wahabisme, dengan latar belakang terbatasnya sumber-sumber ekonomi serta kapabilitas militer, raja Abdul Azis terpaksa melaksanakan politik pragmatis demi keamanan Negeranya. Cara yang diambil adalah dengan cara membuat perianjian-perianjian persahabatan dengan Negara-

negara islam, diantaranya Mesir, Irak, Yordania, Kuwait serta Yaman. Tetapi sebenarnya, dengan perjanjian persahabatan tersebut, Saudi Arabia ingin menciptakan suatu keseimbangan kekuatan di teluk Parsi, dan memungkinkan Saudi Arabia menjadi suatu Negara yang tidak bergantung pada kekuatan-kekuatan besar.

Pada periode *kedua* yaitu, orientasi politik Saudi pada fase perang dingin 1956-1967 mulai mengalami pergeseran. Saudi Arabia lebih berhati-hati dalam mengadakan hubungan terhadap Mesir, anti imperialis berpegang pada penolakan terhadap ideologi yang radikal ,yang dapat terwujud dalam nasionalisme Arab yang revolusioner, sosialisme maupun komunisme. Islam adalah unsur politik luar negeri Saudi Arabia yang kemudian dijadikan doktrin dalam pertahanan keamanan. Dalam perang dingin Arab, pemerintah Saudi Arabia mencoba membagi Pan-Arabisme dengan Pan-Islamisme dan solidaritas islam.²⁰ Dalam hal ini Saudi Arabia mencoba menggalang persahabatan dengan Negar-negara islam non arab , misalnya denga Iran, pada tahun 1963 sehingga timbul reaksi dari kairo yang menuduh Saudi Arabi dan Iran, berkeinginan untuk membentuk fakta islam sebagai alat untuk menghancurkan persatuan arab. Disampin itu, sebagai salah satu negara gerakan non blok, Saudi Arabia juga berupaya untu menggabungkan persepsi netral dengan solidaritas islam untuk melawan keterlibatan Negara-negara adikuasa di dunia islam, sehingga menimbulkan dugaan bahwa islam akan menjadi kekuatan ketiga setelah kapitalisme dan komunisme. Hal tersebut menjadi tema dalam setiap Konfrensi islam tahun 1950-an.

²⁰ M Amien Rais, Politik dan Pemerintahan Timur Tengah (Yogyakarta :Fisipol UGM 1983) p

Selama tahun 1950 – 1960, Saudi Arabia mengadakan aliansi baru melawan radikalisme islam, tetapi di samping itu juga mengadakan hubungan dengan Mesir- Syiria. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa Saudi cenderung berpindah dari orbit nasionalisme arab yang militan. Ini terbukti dengan aliansi yang dilakukan dinasti selama ini menjadi persaingan, yaitu Yordania dan Irak. Hal inilah yang mempertajam keretakan ideologi di dunia arab. Keretakan itu semakin meningkat dengan tergulingnya monarkhi irak 1958, pecahnya Republik persatuan Arab, 1961 dan pecahnya perang saudara di Yaman 1962. Akibatnya, terjadilah perubahan yang sangat politik dalam politik Luar negeri Saudi Arabia, dimana Saudi Arabia dan Mesir mulai bersimpang arah.

Dibawah raja Faisal, politik Saudi Arabia terhadap sesama negara Arab dapat diklarifikasikan sebagai politik yang konservatif. Saudi Arabia tidak menginginkan perubahan status quo dan perubahan-perubahan teritorial Negara-negara arab akibat adanya usaha – usaha federasi atau integrasi seperti yang dilakukan Negara arab pada waktu itu. Selain itu Saudi Arabia berusaha untuk memenangkan pertarungan melawan ideologi yang revolusioner sebagaimana yang disebarkan oleh Negara-negar pan arab yang berpusat di Kairo pada waktu Nasser.

Untuk mengimbangi arus revolusioner Negara- Negara Republik arab lainnya Saudi Arabia berusaha menjalin persahabatan dengan Negara monarkhi lainnya, seperti Yordania, Kuwait, Maroko, Yaman Royalis dan Libya sebelum revolusi Khaddafi 1969. Adanya perang saudara di Yaman makin memperuncing pertentangan kubu konservatif dan kubu revolusioner. Dalam hal ini Mesir

membantu kaum Republik yang ingin menggulingkan monarki. Sedangkan Saudi Arabia tentu saja melakukan intervensi tandingan dengan membantu kaum royalis, yang mengakibatkan kegagalan intervensi mesir di yaman. Seusai perang Arab Israel, sengketa Yaman dapat diselesaikan dengan konfrensi khaurtoun.

Pada periode *ketiga* yaitu, yang dimulai sejak tahun 1967, Saudi Arabia muncul sebagai Negara yang dominan dan berusaha mengubah perimbangan kekuatan di Timur Tengah sesudah adanya perang arab – Israel bulan Juni 1967 serta berusaha meningkatkan kekayaan minyaknya. Saudi Arabia mempunyai suku cadang minyak $\frac{1}{4}$ cadangan minyak dunia merupakan salah satu salah satu pengekspor terbesar di dunia, menjadi anggota dari OPEC maupun OAPEC sampai saat ini. Peran Saudi Arabia sangatlah menentukan dan sangat vital dalam menentukan harga minyak dunia serta produk maksimumnya. Saudi Arabia memilih garis kebijaksanaannya yang moderat dan menolak ekstrimisme dalam dunai perminyakan. Kebijakan itu memelihara stabilitas ekonomi intrnasional.

Sejak tahun 1967, politik negeri Saudi Arabia mempunyai tiga sasaran utama²¹:

1. Mendukung negara- negara Arab termasuk PLO melawan Israel. Dukungan ini juga ditujukan agar tercapainya perdamaian Arab- Israel. Saudi Arabia tahu bahwa Israel mempunyai kemampuan untuk menghancurkan ladang – ladang minyaknya.

²¹ Harwanto Dahlan, *op cit*, hal. 24

2. Tercapainya stabilitas dan keamanan, serta berjuang untuk membendung pengaruh radikalisme, terutama komunisme dianggap sebagai bahaya utama untuk agama islam dan kebudayaan Arab.
3. Memajukan islam dengan memperjuangkan suatu kebangkitan Islam di dunia, antara lain dengan menunjukkan perkembangan sosial dan ekonomi dalam dunia islam, termasuk menyebarkan nilai- nilai dan norma-norma islam, serta pembentukan Bank Islam, yang memberikan bantuan kepada Negara- Negara Islam. Bantuan yang diberikan oleh Saudi terhadap Negara-negara Islam $\frac{3}{4}$ diantaranya diberikan kepada negara-negara arab.

Pada tahun 1970-an, politik Saudi Arabia lebih tegas dan lebih aktif dari pada tahun-tahun 1960-an. Ideologi islam tidak hanya berfungsi sebagai alat politik luar negerinya, tetapi juga secara terus menerus semakin memperkuat posisi Saudi Arabia sebagai penegak nilai-nilai islam. Pecahnya perang Arab-Israel 1973, yang dilanjutkan kepada embargo minyak kepada Negara-negara barat menjadikan Saudi Arabia tampil sebagai salah satu Negara terkemuka yang mempunyai pengaruh besar dalam peraturan politik dunia. Pengaruh Saudi Arabia semakin meningkat berkat penggunaan senjata minyaknya secara efektif yang merupakan penunjang bagi kepemimpinannya. Berkat kekayaan yang digunakan untuk menunjang politik luar negerinya, maka pada tahun –tahun 1970-an sampai sekarang Saudi Arabia mempunyai peran penting dalam politik regional maupun

internasional, sesuai dengan arah politik luar negrinya yang liberal dan pro Barat.²²

Dengan sikap yang liberal dan pro barat dan anti komunis, tentu saja Arab Saudi tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Negara-negara komunis atau sosialis. Sebaliknya hubungan dengan barat terutama denga Amerika Serikat sangat erat bahkan sudah sampai pada tingkat sekutu dengan kadar ketergantungan yang tinggi. Secara politik hal ini bisa dimengerti karena kepentingan pembangunan dan pertahanann keamanannya sangat memerlukan dunia barat, khususnya Amerika Serikat.

Dalam hal ini Amerika Serikatlah yang mempunyai kemampuan lebih besar dan kuat dalam pertahanan dan keamanan. Amerika Serikat merupakan Negara yang paling dekat dengan Arab Saudi. Pada dasarnya politik Luar Negeri Arab Saudi dengan Amerika serikat memiliki tiga landasan utama untuk bersahabat dengan Amerika Serikat, yakni²³:

Pertama, keduanya anti komunis dan gerakan-gerakan radikal revolusioner

Kedua, keduanya menginginkan stabilitas dan keamanan di kawasan teluk

Ketiga, keduanya menginginkan kontuinitas mengalirnya minyak dari Teluk ke Negara-negara industri agar tetap menguntungkan baik pihak penjual maupun pihak pembeli minyak.

²² Harwanto Dahlan, *op cit*, hal. 25

²³ Sidik Jatmika, *AS Penghamabt Demokrasi; Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001, hal 66-67

Pada dasarnya hubungan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat bersifat komplementer, dan Amerika Serikat sering bertindak sebagai pelindung integritas wilayah dan keamanan nasional Arab Saudi. Pada saat Mesir melakukan pemboman atas wilayah Arab Saudi semasa perang saudara di Yaman pada awal tahun 1960-an pesawat- pesawat Amerika terbang diatas wilayah yang sama sebagai ancaman terhadap Mesir untuk tidak meneruskan pertualangan militer di wilayah Arab Saudi.

Pada saat Arab Saudi mengalami ketakutan terhadap ancaman ekspor revolusi Republik Islam Iran, Amerika Serikat memberikan komitmen pembelaannya terhadap eksistensi Arab Saudi. Ketergantungan Arab Saudi terhadap perlindungan militer Amerika Serikat kian menguat tahun 1979 dalam kasus sebagai berikut:

1. 1979 sejak Khomeini mengambil alih Iran dan menetapkan ekspor revolusi
2. November 1979, terjadi pendudukan mekkah oleh para pemberontak anti penguasa Arab Saudi
3. Desember 1979, Uni Soviet invasi ke afganistan yang memperkuat kekhawatiran akan kian meluasnya pengaruh komunisme Uni Soviet di Timur Tengah.

Bagi Amerika Serikat Arab Saudi adalah salah satu Negara koalisinya yang bisa membantunya dalam mencapai kepentingan Amerika di kawasan Teluk.

Kebijakan tersebut tetap berlanjut pada masa-masa berikutnya.²⁴ Hubungan Arab Saudi dengan Negara-negara Barat lainnya yaitu, Inggris, Perancis dan Jerman juga semakin meningkat. Ketiga Negara tersebut juga merupakan negara pemasok senjata bagi Arab Saudi, dimana kontrak pembelian senjata Arab Saudi dengan Negara-negara tersebut mencapai milyaran dollar.²⁵

B. Dinamika Hubungan Konflik Arab Saudi dengan Yaman

Saudi Arabia dan Yaman merupakan kedua Negara yang memiliki keanekaragaman etnis, hubungan kedua Negara tersebut tidak terlepas dari konflik. Sengketa perbatasan dan konflik yang timbul antara Arab Saudi dengan Yaman ini tidak dapat dilepaskan dari faktor historis-politis. Dilihat dari struktur dan sistem politik yang dianut, kedua negara tersebut menunjukkan adanya perbedaan, yang dalam beberapa aspek bahkan bertentangan. Arab Saudi merupakan suatu negara kerajaan, sedangkan Yaman merupakan suatu Negara Republik. Keberadaan sistem politik yang saling berbeda tersebut tidak akan menjadi suatu masalah apabila tidak ada saling mempengaruhi.

Permasalahan konflik yang terjadi antar Saudi dan Yaman muncul tatkala sejak sebelum integrasi Republik Yaman. Yang mana sebelumnya Republik Yaman merupakan Negara Kesatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan. Saudi, Yaman utara, dan Yaman Selatan merupakan wilayah saling berbatasan. Ketiganya berusaha saling mempengaruhi dan menguasai. Hubungan yang kurang harmonis antara Arab Saudi dengan Yaman Utara pertama kali muncul ketika

terjadi perubahan rezim dari yang semula menganut sistem keimaman (imamah) menjadi sistem republik tahun 1962. Di bawah sistem Imamah, Yaman Utara lebih menunjukkan banyak kesamaan dengan Arab Saudi , yaitu sama-sama kerajaan, di mana raja memerintah secara turun temurun. Arab Saudi merasa lebih aman dan kelangsungan hidup royalis kerajaannya lebih terjamin apabila Yaman Utara juga merupakan suatu negara kerajaan²⁶. Sebaliknya, akan merupakan suatu ancaman bagi Arab Saudi bila Yaman Utara berdiri sebagai suatu negara republik yang kuat, yang dalam persepsi Arab Saudi mungkin akan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi rakyat Arab Saudi agar lebih demokratis dan menentang pemerintaban royalis. Dari sini tidaklah mengherankan bila dalam Revolusi 1962 di Yaman Utara, Arab Saudi lebih memberikan dukungan kepada Imam Mohammad Badr dalam menghadapi Kolonel Abdullah Salleh yang didukung oleh Mesir, yang mana berusaha menumbangkan sistem keimamahan. Namun demikian, ternyata telah menjadi kenyataan yang tak dapat dipungkiri oleh Arab Saudi bahwa Yaman Utara akhirnya memilih bentuk pemerintahan Republik setelah Revolusi 1962 tersebut. Beranjak dari latar belakang historis ini, tidak mengherankan pula bila pada masa- masa berikutnya, hubungan Arab Saudi dengan Yaman Utara kemudian menjadi tidak harmonis. Yaman Utara menganggap Arab Saudi sebagai suatu ancaman bagi keberadaan negerinya yang Republik, sementara Arab Saudi berusaha memiliki kontrol atas wilayah perbatasannya dengan Yaman Utara, agar dapat memantau dan mencegah meluasnya semangat Republik ke wilayahnya.

²⁶ "Yamani Unification" dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Yemeni_unification diakses pada 10

Sementara itu, hubungan yang terjalin antara Arab Saudi dengan Yaman Selatan juga tidak pernah merupakan hubungan yang harmonis. Latar belakang perbedaan ideologi kedua negara tersebut dapat menjelaskan mengapa sikap saling mencurigai dan menganggap satu dengan yang lain sebagai ancaman lebih sering terjadi. Arab Saudi mengklaim Yaman Selatan sebagai sumber gerakan radikal revolusioner di Arab²⁷. Dalam konteks Perang Dingin, semakin jelas terlihat perbedaan pandangan antara Arab Saudi dengan Yaman Selatan. Sebagai suatu negara komunis yang menganut paham Marxisme, Yaman Selatan sudah berada di pihak Uni Soviet. Sebaliknya, Arab Saudi lebih menunjukkan kecenderungan pro Barat/Amerika Serikat, yang dalam Perang Dingin tersebut menjadi musuh Uni Soviet. Bahkan dalam sengketa perbatasan dengan Yaman Selatan, Arab Saudi kerap meminta bantuan dari Amerika dan negara-negara Barat lainnya, dengan seringkali pula menggunakan alasan untuk mencegah meluasnya pengaruh komunisme yang dimotori oleh gerakan radikal Yaman Selatan.

Pasca integrasi Yaman tahun 1990, krisis Teluk Persia secara dramatis mempengaruhi hubungan luar negeri Yaman. Hubungan Saudi-Yaman kembali bersitegang. Sebagai salah satu anggota Dewan Keamanan PBB pada tahun 1990 - 1991, Yaman mengadopsi sikap abstain pada sejumlah resolusi DK PBB tentang Irak dan Kuwait, Yaman terus mempertahankan hubungannya dengan Irak pada masa rezim Saddam Husein. Negara Barat dan negara-negara Teluk Persia Arab mengecam Yaman dengan membatasi atau membatalkan program bantuan dan

²⁷ Dr. M. Amien Rais, *op. cit.*, hal. 167.

hubungan diplomatik. Salah satunya 850.000 orang pekerja Yaman diusir dari Arab Saudi dan Teluk Persia.²⁸

Pada tahun 1998 sembilan kapal angkatan laut Saudi menggunakan artileri jarak jauh untuk menyerang dan menduduki pulau al-Duwaima yang menewaskan tiga orang Yaman. Al-Duwaima merupakan pulau yang terlalu kecil yang terletak kira-kira di sebelah barat Midi, kota perbatasan Yaman di pantai Laut Merah. Daerah ini memiliki potensi sumber mineral di dasar laut. Karena pulau-pulau ini sangat kecil dan banyak, sulit bagi Yaman untuk melindunginya. Pertempuran yang terjadi di Pulau Duwaima merupakan kelanjutan dari persengketaan perbatasan antara Saudi dan Yaman pada pulau lainnya yaitu pulau Hurab Dhu. Arab Saudi mengklaim bahwa 75% dari pulau-pulau tersebut milik mereka, sedangkan Yaman mengklaim seluruh pulau adalah wilayah mereka. Sebab terjadinya konflik tersebut sangat substansial, isu utama dari sengketa perbatasan tanah tersebut diperkirakan berpotensi mengandung cadangan minyak yang berharga yang memiliki manfaat ekonomi. Hal ini jelas merupakan sumber kekayaan ekonomi bagi kedua negara, khususnya Yaman yang mengalami krisis ekonomi.²⁹ Hingga akhirnya konflik perbatasan tersebut berakhir dengan Perjanjian Jeddah pada tahun 2000, yang mana perjanjian tersebut merupakan kelanjutan perjanjian Taif pada tahun 1934.

²⁸ <http://en.wikipedia.org/wiki/Yemen>

²⁹ "Border row with the Saudi" dalam <http://www.al-bah.com/yemen/artic/mei38.htm> diakses 10

Setelah lebih dari 65 tahun konflik sporadis, Yaman dan Arab Saudi akhirnya menyetujui perjanjian perdamaian di Jeddah tahun 2000, yang menyetujui kesepakatan pembangunan tembok perbatasan. Pada bulan September 2003 persengketaan antara Yaman dan Saudi kembali mencuat, Arab Saudi melakukan pembangunan tembok penghalang perbatasan Saudi-Yaman sepanjang 75 kilometer (45 mil). Kemudian Konstruksi dihentikan pada bulan Februari 2004, ketika Arab Saudi menyetujui untuk menghentikan bangunan tersebut setelah Yaman mengatakan tembok tersebut melanggar perjanjian perbatasan yang ditandatangani pada tahun 2000.

Pembangunan tembok tersebut berawal dari tahun 1990-an, yang mana para pelaku serangan teroris di Arab Saudi telah menggunakan bahan peledak yang berasal dari Yaman. Dan Saudi juga menuding serangan yang terjadi pada tahun 2003 oleh teroris islam radikal yang mengakibatkan 35 orang warga sipil tewas dan ratusan orang terluka juga berasal dari Yaman. Arab Saudi mengklaim konstruksi tembok perbatasan merupakan cara yang penting dalam melindungi kerajaan dari terorisme, mencegah penyelundupan senjata ilegal dan untuk membendung aliran ilegal yang dapat mengancam stabilitas keamanan Arab Saudi³⁰.

Kemudian Pemerintah Yaman menentang pembangunan tembok penghalang tersebut karena sangat membatasi ruang lingkup penduduk setempat, terutama dalam ruang gerak para penduduk yang bekerja untuk melintas dengan

³⁰ "Saudi security barrier stirs anger in Yemen" dalam

<http://www.guardian.co.uk/world/2004/feb/17/saudi-arabia-yemen>, diakses 20 Juni 2010

bebas sehingga dapat menurunkan perekonomian. Pemerintah Yaman awalnya menentang konstruksi melanggar perjanjian perbatasan sesuai tahun 2000 di Jeddah, yang mana berisikan kebebasan untuk pengembala mengambil rumput dalam 13 mil (21 km) perbatasan dan ditetapkan bahwa tidak ada angkatan bersenjata ditempatkan di dalamnya . Kemudian disusul juga dengan aksi protes suku Syiah yang tinggal di Yaman dekat perbatasan Saudi -Yaman merasa keberatan atas pembangunan tembok tersebut, karena telah melanggar hak asasi manusia. Mereka menyatakan bahwa Saudi melewati batas rute rintangan yang membentang dari Jabal Hobash ke Jabal Al Fara , sekitar antara 4-7 km di luar zona netral di Yaman.

Pada bulan Februari 2004 setelah perundingan diplomatik Mesir dan AS, Arab Saudi memutuskan untuk menghentikan pembangunan tembok penghalang tersebut. Yaman setuju bahwa kedua belah pihak akan melakukan patroli bersama dan mendirikan penjagaan keamanan di sepanjang perbatasan untuk mencegah penyelundupan lintas-perbatasan dan infiltrasi³¹. Namun pada bulan Januari 2008, pemerintah Saudi membangun kembali tembok sepanjang perbatasan di kabupaten Harad. Pembangunan tembok tersebut melanggar perjanjian Yaman-Saudi. Situs Mareb press Yaman melaporkan mengatakan bahwa penjaga perbatasan Yaman berusaha untuk mencegah pembangunan, tetapi Saudi memobilisasi kekuatan militer dan mengancam jika terjadinya penghambatan pembangunan. Dan menurut sumber dari Harad bahwa lebih dari 3.000 suku dari

³¹ "Efforts To Bridge Gaps Between Yemen And Egypt Continue"
dalam <http://www.yementimes.com/DefaultDET.aspx?i=711&n=front&a=1>. diakses 28 Juni 2010

desa-desa yang berdekatan dengan daerah-daerah berupaya untuk menentang dan menyatakan kerugian atas pembangunan tersebut karena dapat menjadi penghambat bagi mereka dalam menyeberang ke seberang perbatasan untuk mengunjungi keluarganya dan membudidayakan peternakan mereka.³²

Pada tahun 2007 lebih dari 60.000 orang Yaman dideportasi dari Arab Saudi karena dianggap sebagai imigrasi ilegal. Sebanyak 35.000 orang dideportasi melalui Harad, sementara 25.000 orang dideportasi melalui pelabuhan al-Hodiedah. Dan pada tahun 2009, Arab Saudi mulai mengawasi proyek pembangunan untuk memulai instalasi jaringan keamanan tingkat tinggi di sepanjang perbatasan dengan pembangunan pagar kawat berduri di sepanjang sebagian besar perbatasan sekitar 1.600 kilometer terutama di sepanjang Gunung Doud dan Gunung Dukhan, guna untuk memblokir aliran ribuan pemberontak Syiah dan para pendukungnya dari Yaman ke kerajaan Saudi³³.

³² "Saudi authorities erect barriers on Yemeni border" dalam <http://www.yobserver.com/front-page/10013538.html>, diakses 29 juni 2010

³³ "Saudis urgently erect new border fence to block 'massive' immigration of Shi'ites" dalam http://www.worldtribune.com/worldtribune/WTARC/2009/mc_saudis0966_12_15.asp diakses 1